

Orang Tua Murid Demo di Balkot DKI, Protes Sistem PPDB Diskriminatif

JAKARTA (IM) - Sejumlah orang tua murid bersama Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (Kopaja) menggelar demonstrasi soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/6).

Dari pantauan, aksi demonstrasi dimulai pukul 11.00 WIB. Mereka memprotes sistem PPDB yang dianggap diskriminatif.

"Dalam PPDB ini masih terjadi sistem seleksi yang diskriminasi," kata Taufan, salah satu orang tua murid.

Taufan menyebut sistem PPDB saat ini membuat banyak murid tidak diterima di sekolah negeri, sehingga terpaksa harus masuk sekolah swasta.

Dalam poster yang dibawa massa aksi, mereka menulis bahwa setengah lulusan SD tidak tertampung di SMP Negeri. Lalu, sebanyak dua per tiga lulusan SMP tidak tertampung SMA atau SMK negeri.

Taufan mengatakan tidak semua orang tua siswa mampu menyekolahkan anak di sekolah swasta. Dia mengingatkan hak pendidikan harusnya dijamin oleh pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Perda DKI Nomor 8 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan mewajibkan pemerintah daerah menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun.

"Konstitusi menjamin anak-anak Indonesia untuk bisa bersekolah dengan tanpa dipungut biaya, yang berlaku untuk semua anak Indonesia," kata dia.

Perwakilan Kopaja, Ubaid Matrajati menyinggung

soal alokasi dana APBD untuk pendidikan. Ia menyebutkan APBD DKI Jakarta tahun 2023 mencapai 83,7 triliun, tapi hanya 17 persen yang dialokasikan untuk pendidikan.

Ubaid mengaku paham banyak kebutuhan yang harus ditutupi oleh APBD, salah satunya anggaran belanja pegawai.

Namun, selama ini tidak tahu sebetulnya berapa besar uang yang dibutuhkan untuk hal tersebut. Karena itu, pihaknya ingin bertemu langsung dengan Pemprov dan DPRD DKI.

"Walaupun sebenarnya juga bukan pengambil kebijakan mutlak karena ada teman-teman DPRD yang akan duduk akan memutuskan soal anggaran pendidikan," kata Ubaid.

"Jadi sekali lagi kami datang kemari ingin dengar langsung betulkah mereka nggak punya uang? Betulkah mereka nggak punya uang seperti itu?" imbuhnya.

Ubaid pun menilai PPDB bersama untuk tingkat SMA/SMK yang diinisiasi Pemprov DKI tak jadi solusi. Lewat PPDB bersama yang dimulai 19-23 Juni itu, siswa bisa memilih sekolah swasta dan akan dibiayai Pemprov.

Namun, menurut dia, PPDB bersama belum menjawab keresahan orang tua dan jadi solusi bagi siswa yang tidak lolos PPDB. Sebab, skema PPDB bersama hanya menampung empat persen dari total siswa yang tidak lolos PPDB tingkat SMA/SMK sebelumnya.

PPDB bersama itu hanya sebuah janji janji itu yang kalo dilihat, hanya mampu menampung empat persen dari total kebutuhan," ujarnya. ● yan

Anggota DPRD DKI: Banyak PJLP Ngadu Gaji Masih di Bawah UMP 2023

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarifudin menyoroji gaji pegawai penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) yang sampai saat ini belum sesuai upah minimum provinsi (UMP) 2023, yakni Rp 4,9 juta. Ia mengaku banyak menerima aduan dari PJLP terkait gaji yang tidak sesuai UMP 2023.

"Ada beberapa yang mengadu ke saya (soal gaji) belum naik, karena sebelumnya Gubernur katanya UMP 2023 Rp 4,9 juta, tapi ternyata pas cek gaji, mereka masih (menerima) Rp 4,6 juta," ujar Syarifudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/6).

Syarifudin mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima, keputusan gubernur (kepgub) terkait kenaikan gaji PJLP telah selesai dibuat. Namun, kepgub terkait gaji PJLP setara UMP 2023 belum ditandatangani oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

"Ya, belum ditandatangani sama Pak Pj Gubernur. Mungkin lagi dicari bagaimana skemanya sesuai dengan aturan agar tidak ada kesalahan," kata Syarifudin.

Syarifudin meminta Heru Budi tak mengeluarkan pernyataan apa pun, termasuk soal aturan gaji, sebelum membahasnya dengan DPRD DKI. "Saya sih berharap Gubernur kalau ada mau kenaikan, kami dikasih tau. Jadi jangan statement dulu, baru dilaksanakan. Tapi harus programkan dulu, proses. Kalau oke dan anggaran ada, kemudian di DPRD dibahas, dinaikkan anggarannya, baru bicara ke media," kata Syarifudin.

Sebelumnya, Heru Budi memastikan bakal menaikkan gaji PJLP yang belum sesuai UMP 2023. "Ya kami akan sesuaikan nanti," ujar Heru menanggapi gaji PJLP yang besarnya masih mengikuti UMP 2022, Senin (12/6).

Kendati demikian, Heru belum menjelaskan secara terperinci kapan penyelesaian gaji para PJLP di Jakarta dilaksanakan.

Heru hanya mengatakan bahwa upah para PJLP akan dinaikkan sesuai UMP DKI Jakarta 2023, yakni Rp 4,9 juta.

"Ya nanti sesuai dengan UMR 2023 ya, sesuai UMR," kata Heru.

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan UMP naik sebesar 5,6 persen atau menjadi Rp 4,9 juta pada 2023. Sebelumnya, pada 2022, UMP DKI sebesar Rp 4,6 juta. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANTARA



PASOKAN HEWAN KURBAN DI JAKARTA

Pekerja memberi makan pada kambing asal Pacitan, Jawa Timur yang dijual di kawasan Rorotan 2, Jakarta Utara, Selasa (20/6). Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta, sekitar 82 ribu pasokan hewan kurban diperkirakan bakal masuk ke Ibu Kota jelang Hari Raya Idul Adha 1444 H dengan rincian 22.695 ekor hewan yang diperiksa terdiri dari 14.144 ekor sapi, 58 ekor kerbau, 6.993 ekor kambing, dan 1.302 ekor domba.

CEGAH BANJIR YANG KERAP TERJADI DI SIMPANG HEK

Tanggul Sepanjang 800 Meter Bakal Dibangun di Kali Baru

Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur, Wawan Kurniawan mengatakan titik lokasi pembangunan tanggul setinggi satu meter itu dimulai dari jembatan Jalan H Jabah sampai ke jembatan Jalan Inpres.

JAKARTA (IM) - Tanggul sepanjang 800 meter akan dibangun di Kali Baru, untuk mencegah banjir yang kerap terjadi di Simpang Hek, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur, Wawan Kurniawan mengatakan titik lokasi pembangunan tanggul setinggi

satu meter itu dimulai dari jembatan Jalan H Jabah sampai ke jembatan Jalan Inpres.

"Saat ini sedang proses lelang," kata Wawan dalam keterangan tertulis, Selasa (20/6).

Selain tanggul, sejumlah jembatan yang melintang di atas Kali Baru juga akan direnovasi. Sebab, jembatan yang

ada sekarang terlalu rendah, sehingga banyak sampah tersangkut dan memicu terjadinya luapan air kali.

"Saat debit air tinggi banyak sampah tersumbat di jembatan tersebut dan membuat air melimpas ke jalan maupun permukiman warga," ujarnya.

Sejumlah jembatan yang perlu diitinggikan adalah jembatan di depan akses keluar Pasar Induk Kramat Jati, Jalan Jabah, Jalan Bulak Rantai, Jalan Ikan Hias atau Jalan Ayamah, dan di beberapa titik lain.

Untuk renovasi jembatan ini, Sudin SDA Jaktim akan berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga, UPK Badan Air, serta pihak kelurahan dan

kecamatan setempat.

Menanggapi rencana tersebut, Ketua RT 01/01 Rudi Rohendi berharap normalisasi dan penataan Kali Baru segera dilakukan. Setiap debit air kali tinggi, banyak rembesan dari tanggul dan turap hingga akhirnya menggenangi ke permukiman warga.

Rudi mengungkapkan, di wilayahnya ada satu titik turap yang mulai keropos dan berlubang. Jika dibiarkan, dia khawatir turap longsor dan permukiman warga di bawahnya terancam terdam-

pak genangan yang cukup parah.

"Warga berharap pembangunan tanggul segera direalisasikan. Termasuk bagian turap yang bocor segera diperbaiki," kata Rudi.

Peninggian tanggul Kali Baru itu dilakukan setelah berulang kali kali itu meluap. Kemarin, Kali Baru kembali meluap dan menyebabkan banjir di Simpang Hek, Jalan Raya Bogor. Akibatnya terjadi kemacetan di Jalan Raya Bogor dan Jalan H. Bokir Bin Dji'un, Kramat Jati pada Senin pagi. ● yan

Penertiban Bangunan Liar di Area TPU Prumpung Jaktim

JAKARTA (IM) - Kepala Suku Dinas (Kasudin) Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur, Djauhar Ariefien mengatakan para pemilik telah membongkar 100 kandang unggas mereka yang terbangun di area Taman Pemakaman Umum (TPU). Menurut Djauhar, mereka merobohkan sendiri bangunan liar itu secara sukarela.

"Sejak diedarkannya surat imbauan ini kepada para pemilik bangunan, saat ini sudah ada 100 kandang unggas yang telah dibongkar sendiri oleh pemiliknya," kata Djauhar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/6).

Sebelumnya, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jaktim melayangkan surat imbauan kepada pemilik bangunan liar yang ada di area TPU Prumpung pada 12 Juni 2023. Surat ini dilayangkan menjelang dilakukannya penertiban secara terpadu di tingkat kota.

Isi surat tersebut memuat enam poin, salah satunya

imbau agar para pemilik bangunan liar membongkar sendiri asetnya sebelum diterbitkan tim gabungan.

"Kami ingin lakukan pendekatan persuasif dalam penataan TPU Prumpung ini. Alhamdulillah masyarakat sudah paham dan mau membongkar sendiri bangunannya," ucap Djauhar.

Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur mencatat terdapat 60 pedagang kaki lima (PKL) yang setiap harinya berjualan di pasar kaget, pinggir pagar TPU Prumpung, RT 3 dan 6/RW 2 Kelurahan Cipinang Besar Utara. Sebagian PKL juga mengokupasi lahan di RW 1 kelurahan yang sama.

Menurut Djauhar, petugas mengelilingi TPU setiap sore sembari menawarkan bantuan pemindahan barang kepada pemilik bangunan liar yang telah melakukan pembongkaran. "Di TPU ini total ada 12 Satgas Hijau dan lima petugas keamanan dalam (Pamdal)," katanya. ● yan

Sambut HUT Ke-496 Jakarta, Pemprov DKI Kembali Gelar Bazar Balai Kota

JAKARTA (IM) - Menyambut HUT ke-496 Jakarta pada Kamis (22/6), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) menyelenggarakan Bazar Balai Kota. Kegiatan bertajuk 'Jadi Karya Untuk Nusantara' tersebut digelar di Blok G, Lantai Dasar Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada 19-22 Juni 2023.

Kegiatan tersebut sesuai dengan komitmen Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan, rasa cinta terhadap produk dalam negeri, serta bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemprov DKI kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) binaan program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur).

Kepala Dinas PPKUKM DKI, Elisabeth Ratu Rante

Allo, mengatakan kegiatan tersebut untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas untuk bisa mendapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selain itu, tentu saja untuk menciptakan akses pasar baru bagi pelaku UMKM Jakpreneur.

"Harapan kami juga kegiatan bazar ini dapat meningkatkan promosi produk-produk kreatif dari UMKM serta mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia (Gernas BBI)," kata Ratu di Jakarta pada Selasa (20/6).

Selain bazar, lanjut Ratu, di dalam kegiatan tersebut juga terdapat sejumlah pelatihan hardskill dan softskill serta sosialisasi kepada para pelaku UMKM. Mereka yang menjadi narasumber berasal

dari Bank DKI Jakarta hingga Tempat Kumpul Kreatif, yang bakal memberikan masukan agar para pelaku UMKM di Ibu Kota bisa berkembang.

Adapun pelaku usaha yang terlibat dalam bazar ini terdiri atas 36 UKM, booth Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia (APJI), booth Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), serta tiga dari Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo).

"Pembukaan bazar ini juga dihadiri oleh perwakilan Kemkumham, BPJS Ketagakerjaan, BI Provinsi DKI Jakarta, Bank DKI, UKM Jakarta Entrepreneur, Asmindo dan APJI," kata Ratu. ● yan

FOTO: ANTARA



PERMUKIMAN DI BAWAH JALAN TOL

Sejumlah warga berdiri di kawasan permukiman di bawah jalan tol dalam kota Cawang-Tomang-Pluit di Jelambar Baru, Jakarta Barat, Selasa (20/6). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menertibkan warga yang tinggal di kawasan tersebut karena dianggap membahayakan keselamatan mereka.

Pemprov DKI Diminta Perluas Jangkauan Transportasi Umum hingga ke Permukiman

JAKARTA (IM) - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi memperluas jangkauan transportasi umum hingga ke permukiman penduduk.

Langkah ini diperlukan untuk memudahkan pengguna transportasi publik menjangkau dari rumah.

"Integrasi ini perlu kita kembangkan terus. Cakupan dari jangkauan transportasi kita ini harus bisa mencapai tempat-tempat permukiman, perumahan, dan permukiman yang padat penduduk," ujar Anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana, Selasa (20/6).

Menurut William, masyarakat belum sepenuhnya

menggunakan transportasi umum, karena titik keberangkatan sulit dijangkau dari rumah.

"Mungkin dia harus menemukannya dengan ojek online, ataupun dengan sepeda motor mungkin 5-10 menit. Sehingga dia lebih baik pakai transportasi pribadi," kata William.

Kondisi ini akhirnya membuat masyarakat akhirnya memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas, dibandingkan menumpang transportasi umum di Jakarta. "Nah, cakupan inilah yang menurut saya harus bisa diselesaikan dan harus dibuat titik-titik nya yang jauh lebih dekat ke tempat permukiman warga," pungkash William. ● yan

INFORMASI RELOKASI KANTOR CABANG KB BUKOPIN

Yth Nasabah KB Bukopin,

Dengan ini kami informasikan bahwa efektif pada tanggal 31 Juli 2023 akan dilakukan relokasi layanan Kantor Cabang Operasional sebagai berikut:

| Kantor Cabang Pembantu Ciranjang Cianjur | |
|--|--|
| Alamat Kantor Lama | Alamat Kantor Baru |
| Jalan Raya Bandung No. 3, Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat | Jl.Raya Cianjur - Bandung, Desa Cibuki, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat |

Terkait dengan relokasi layanan tersebut, Nasabah KB Bukopin tetap dapat melakukan transaksi di seluruh jaringan cabang dan e-channel Bank KB Bukopin.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Halo KB Bukopin 14005 dan Bank KB Bukopin Kantor Cabang Pembantu Ciranjang Cianjur (0265) 2931732

Hormat Kami,

PT Bank KB Bukopin, Tbk

KB Bukopin